



Dukungan IFRS pada FDI dalam Peningkatan Kemakmuran Negara

Riesanti Edie Wijaya

Universitas Surabaya

riesanti@staff.ubaya.ac.id

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.87

Informasi Artikel:

Tanggal masuk 2018-08-20

Tanggal revisi 2018-09-03

Tanggal diterima 2018-09-30

Keywords:

IFRS, FDI, GDP, reporting quality, unemployment.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the role of IFRS application in economic welfare. Based on macroeconomics data from World Bank, the regression analysis was used to observe the relationship between IFRS and FDI. The IFRS fail to entice FDI flow in Indonesia. Unfortunately, the financial reporting quality has not increased yet by IFRS application. Furthermore, IFRS fail to lessen the risk of doing business in Indonesia. FDI investments are not intended for transferring technology and knowledge. To sum up, FDI potentially become a burden for the economic welfare.

Kata Kunci :

IFRS, FDI, kualitas pelaporan, pengangguran

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran aplikasi IFRS dalam kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan data makroekonomi dari Bank Dunia, analisis regresi digunakan untuk mengamati hubungan antara IFRS dan FDI. IFRS gagal untuk memikat aliran FDI di Indonesia. Sayangnya, kualitas pelaporan keuangan belum meningkat dengan aplikasi IFRS. Selanjutnya, IFRS gagal mengurangi risiko berbisnis di Indonesia. Investasi FDI tidak dimaksudkan untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan. Singkatnya, FDI berpotensi menjadi beban bagi kesejahteraan ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Seorang investor membutuhkan informasi sebelum membuat keputusan bisnis. Salah satu informasi yang dibutuhkan para investor ada dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan akan mengidentifikasi, mencatat, meringkas dan melaporkan berbagai transaksi

ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Dengan membaca laporan keuangan, para pengguna akan melihat bagaimana fenomena keuangan terjadi dalam perusahaan. Informasi keuangan pada laporan bersifat umum. Artinya, laporan keuangan tidak dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan sekelompok pengguna tertentu.

Laporan keuangan yang baik seharusnya bisa dibandingkan dengan lainnya. Perbandingan laporan keuangan memiliki berbagai kemanfaatan mulai dari memperendah kos, mendapatkan informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas informasi relevan yang dibutuhkan para pembuat keputusan bisnis (De Franco, Kothari, & Verdi, 2011). Agar bisa diperbandingkan antara satu dengan lainnya, maka laporan harus dibuat dengan standar keuangan akuntansi. Standar akuntansi akan memberikan panduan pelaksanaan prinsip untuk membuat pelaporan keuangan perusahaan (Epstein & Jermakowicz, 2010). Setiap negara memiliki standar pelaporan keuangan sendiri. Perbedaan standar pelaporan antar negara membuat format dan muatan laporan keuangan menjadi berbeda antar negara. Perbedaan tersebut melemahkan daya komparabilitas laporan keuangan (Subramanyam, 2014). Sedangkan, harmonisasasi standar akan menguatkan daya komparabilitas antar negara (Wang, 2014)

Arus globalisasi menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui aliran dana dari satu negara ke negara lainnya (Dreher, 2006). Para calon investor menggunakan berbagai informasi sebelum melakukan keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan salah satu gudang penyedia informasi keuangan. Namun, perbedaan standar akuntansi antar negara membuat para investor membutuhkan biaya lebih banyak karena harus mengubah sesuai dengan format dan bahasa sesuai dengan yang biasa mereka pakai (Ball, 2006). Proses konversi laporan keuangan sesuai dengan standar asal calon investor membutuhkan waktu, sehingga dipandang menyulitkan. Untuk itu, pemerintah harus turun tangan untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka harmonisasi standar internasional (Arnold, 2012). Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki daya komparabilitas laporan keuangan entitas. Pengadopsian IFRS secara penuh diharapkan juga bisa memperbaiki hubungan bilateral antar negara yang berpotensi mendorong penanaman modal asing di dalam negeri (Arnold, 2012). Bagi negara berkembang, keberadaan aliran masuk modal asing sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas entitas domestik negeri. Untuk itu, penerapan IFRS sebagai langkah harmonisasi standar berpeluang meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) (Gordon, Loeb, & Zhu, 2012). Di Indonesia, otoritas berwenang menetapkan standar adalah Dewan Standar Ikatan

Akuntan Indonesia (DSAK). DSAK berperan menyusun standar akuntansi keuangan untuk entitas privat di Indonesia. Di Indonesia, DSAK bertugas melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menjawab pertanyaan terkait standar dari pemerintah, asosiasi, dan lembaga luar negeri (IAI Global). Untuk menghadapi era globalisasi yang telah digambarkan di atas, pemerintah Indonesia melalui DSAK menuntut adanya harmonisasi standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan. Jika tidak ada harmonisasi standar akuntansi, investor di berbagai negara akan mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Misalnya investor Inggris yang mengadopsi IFRS sulit membaca laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang masih mengadopsi GAAP. Implementasi dari harmonisasi ini adalah pemerintah melalui DSAK menyetujui adaptasi SAK mengikuti SAK yang telah ditetapkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) yang disebut dengan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) yang sebenarnya diadopsi dari IAS (*International Accounting Standard*).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran aplikasi IFRS dalam kesejahteraan ekonomi melalui FDI. IFRS adalah standar yang mengatur pelaporan keuangan untuk perusahaan privat. IFRS diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Harapannya, peningkatan kualitas pelaporan akan direspon baik oleh para investor asing dalam bentuk FDI. Peningkatan FDI diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, penelitian ini memberikan cakrawala baru tentang bagaimana kemampuan ekonomi mikro [penerapan IFRS] dalam mempengaruhi ekonomi makro [kemakmuran] di Indonesia, sehingga penelitian ini menutup celah yang memisahkan keduanya.

2. KAJIAN TEORI

Kehadiran IFRS merupakan suatu kelanjutan dari IAS yang disusun oleh International Accounting Standard Comittee (IASC) pada tahun 1973. IASC sendiri sebenarnya merupakan suatu organisasi yang beranggotakan badan ataupun organisasi profesi dari berbagai negara, antara lain Australia, Kanada, Perancis,

Jerman, Jepang, Meksiko, dan Belanda (IAI, 2009). Adanya kemunculan dari IFRS dirasa merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia bagi para pemain asing. Adanya percepatan penerapan standar akuntansi global oleh *International Accounting Standard Boards* (IASB) sebenarnya ditujukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya *agency cost* yang mungkin dikeluarkan oleh para pemain asing untuk bermain di negara lain. Perjalanan standar di Indonesia sebenarnya merupakan suatu rangkaian panjang. Bermula dari keberadaan standar gaya Belanda yang disebut *Sound Business Practice* yang berlangsung sampai dengan tahun 1995 (IAI, 2009). Selanjutnya, adanya Prinsip akuntansi yang menggantikan standar ala Belanda pada tahun 1974. Standar ini mengikuti standar akuntansi Amerika yang biasa dikenal dengan GAAP. Lebih lanjut, Indonesia tampak mulai berpaling dari GAAP dengan mulai mengacu pada *International Accounting Standards Comitee* (IASC). Bahkan, pada tahun 1994, Indonesia mulai mengikuti IASC (IFRS) (IAI, 2009).

International Financial Reporting Standard (IFRS) mulai diadopsi penuh di Indonesia pada tahun 2012 sesuai imbauan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan IFRS ini diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan *go public*. Standar ini dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) yang sebelumnya bernama IASC. Penerbitan IFRS dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurang transparansinya laporan keuangan (Wiyani, 2012). Dari uraian ini terkesan bahwa standar keuangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh berbagai negara kurang menjamin adanya transparansi atas laporan keuangan yang disajikan, dan arsitektur keuangan global saat ini masih dirasa kurang kokoh, sehingga IFRS ini diperlukan oleh banyak negara di dunia. Tetapi apakah memang demikian kenyataannya? IFRS disinyalir bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penerapan IFRS akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan berupa transparansi dan ketepatan waktu pengungkapan pengakuan kerugian sehingga berpotensi menurunkan *agency cost* serta meningkatkan tata kelola perusahaan (Ball, 2006). Di samping itu, penerapan IFRS akan mengurangi risiko informasi (*information risk*) antar negara (Márquez-Ramos, 2011).

IFRS juga berpotensi meningkatkan image baik para investor pada negara yang menerapkan IFRS secara penuh dibandingkan parsial (Kim & Shi, 2012). Lebih dari itu, penurunan asimetri informasi akibat penerapan IFRS telah meingkatkan aliran dana asing [FDI] di beberapa negara Eropa (Márquez-Ramos, 2011). Namun, beberapa fakta empiris menunjukkan penerapan IFRS hanyalah merupakan keputusan politik semata. Sebagian besar direktur perusahaan di Romania menyatakan hanya sedikit kemanfaatan yang mereka dapatkan dari penerapan IFRS (Ionas dkk., 2007). Bahkan, penerapan IFRS tidak bisa dimanfaatkan untuk menggenjot aliran dana asing [FDI] masuk pada negara-negara Afrika (Nnadi & Soobaroyen, 2015). Sementara di Indonesia, penerapan IFRS ditujukan agar akuntan lokal dapat sejajar dengan lain di dunia dan keanggotaan [bagian negara G-20] tidak tergeser (Hamidah, 2014). Kecenderungannya, pengaplikasian IFRS di berbagai negara berkembang ditujukan untuk mendapatkan kucuran dana Bank Dunia (Gordon dkk., 2012). Bahkan, Hopper dkk. (2017) meyakinkan bahwa IFRS merupakan perwujudan pendirian merupakan salah satu bentuk upaya mendirikan kerajaan neo-liberalisme di beberapa negara lemah secara ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan paradigma positif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh IFRS dalam meningkatkan perekonomian bangsa melalui peningkatan FDI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Bank Dunia sepanjang tahun 1981-2017. Data untuk IFRS akan dikelompokkan dengan mengacu pada Maradona and Chand (2018). Penerapan IFRS akan dikelompokkan menjadi empat kelompok besar berdasarkan fase penerapan: (1) IFRS belum diterapkan pada tahun sebelum 1991, (2) fase adopsi antara 1991-2007, (3) fase kedua tahun 2008-2012, (4) fase adopsi penuh tahun 2013-2018. Selain menganalisis pengaruh IFRS terhadap FDI, peneliti juga mempelajari kemampuan FDI dalam meningkatkan kemampuan kemakmuran bangsa. Peneliti menggunakan beberapa variabel control antara lain: pengendalian korupsi, stabilitas politik, upah minimum rata-rata nasional, populasi, angkatan kerja untuk lebih memahami fenomena FDI. Peningkatan kemakmuran ditinjau dari *Gross Domestik Product* (GDP), transfer teknologi,

penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia. Pada beberapa bagian pembahasan, peneliti menggunakan data makro Thailand dan Vietnam sebagai negara yang tidak mewajibkan penerapan standar internasional bagi perusahaan yang listing di Bursa.

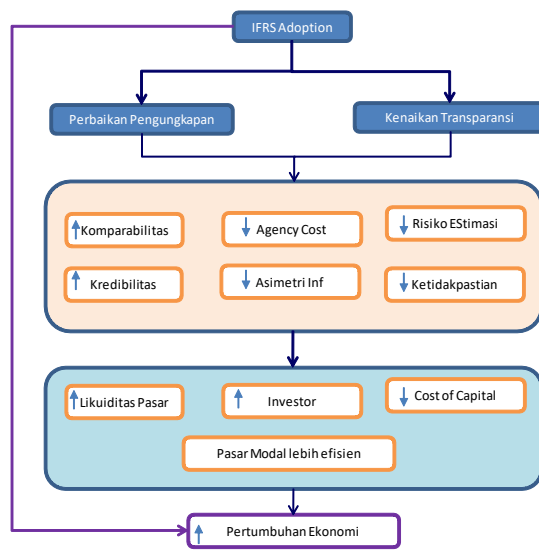
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaung IAS (*International Accounting Standards*) sebagai cikal bakal IFRS sudah mulai diterapkan pada tahun 1994 di Indonesia (Aprilicia, 2014). IFRS menawarkan angin surga bagi para penggunanya atas semua kemanfaatan yang ditawarkan olehnya. Untuk itu, tidak khayal, bila menteri keuangan Sri Mulyani saat awal pengadopsian berargumen bahwa pengadopsian IFRS merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia agar mendapat pengakuan maksimal dari komunitas internasional penganut IFRS (Kompas, 2010). Sebagai regulator, menteri keuangan serta para legislator tersihir dengan IFRS seperti yang dikemukakan oleh Hamidah (2013). Menilik pernyataan menteri keuangan saat itu, maka terkesan janggal bagi kita untuk tidak mempertanyakan mengapa kita harus melakukan itu. Dimana, kita tanpa sadar tersihir oleh kemolekan dan kecanggihan IFRS.

IFRS menawarkan upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi bagi para pengadopsinya yang diskemakan pada Bagan 1. Bagan 1 menunjukkan cara kerja IFRS dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomis suatu negara. Pada bagan 1 nampak bahwa IFRS akan memperbaiki kualitas pengungkapan serta transparansi pelaporan perusahaan. Pengungkapan yang baik akan menampilkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan dengan perusahaan bersangkutan.

Grafik 2 menunjukkan bahwa pengungkapan informasi untuk pemegang saham minoritas tidak berubah pada masa penerapan IFRS. Luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan yang tercatat dalam bursa masih tetap sama sebelum dan setelah pengungkapan. Pada bagan juga memperlihatkan luas pengungkapan negara Vietnam dan negara Thailand. Kedua negara tersebut tidak mengharuskan perusahaan yang listing di bursa untuk menerapkan IFRS. Luas pengungkapan Indonesia memang jauh lebih baik dibandingkan Vietnam, tetapi sama dengan Thailand.

IFRS sebenarnya lebih ditujukan untuk menarik dana maupun bantuan asing ke Indonesia.



Bagan 1. Dampak Adopsi IFRS

Berbagai bentuk aliran dana dan bantuan asing masih sangat dibutuhkan oleh negara berkembang untuk menumbuhkan perekonomian mereka (Nwaogu & Ryan, 2015). Untuk itu, pemerintah mengupayakan penerapan IFRS dalam paket kebijakan untuk mendorong dana maupun bantuan asing di Indonesia. Sebagaimana, paket kebijakan ternyata merupakan resep ampuh meningkatkan FDI pada beberapa negara berkembang (Sauvant & Mallampally, 2015).

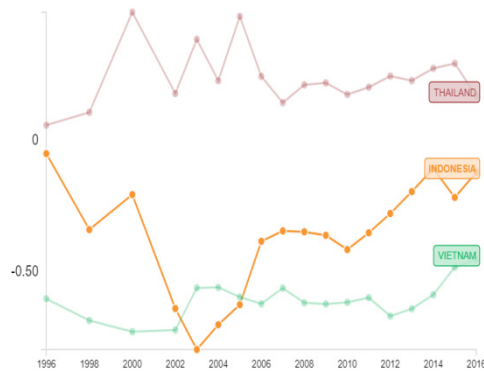
Tabel 1 menunjukkan bagaimana peranan IFRS dalam meningkatkan FDI di Indonesia dari tahun 1996-2016. Tabel 1 menunjukkan probabilitas IFRS sebesar 0,8067, artinya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi FDI. Hasilnya, stabilitas politik (PS) merupakan satu-satunya variabel yang mampu meningkatkan FDI di Indonesia. Padahal, IFRS merupakan cara yang digadagadag mampu meningkatkan FDI di Indonesia.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.46E+11	1.10E+11	-1.327456	0.2091
IFRS	-1.10E+09	4.39E+09	-0.250174	0.8067
CC	7829625	2.09E+08	0.037474	0.9707
IMP	1.46E+08	2.25E+08	0.647735	0.5294
LF	-1.77E+03	1.49E+03	-1.191178	0.2566
POP	1479.852	1203.945	1.229169	0.2426
UMR	-6674.973	13953.92	-0.478358	6.41E-01
PS	6.16E+08	2.94E+08	2.091167	5.85E-02

Tabel 1: Peranan IFRS dalam Peningkatan FDI

IFRS memang secara langsung tidak mampu mempengaruhi FDI di Indonesia. Namun,

IFRS setidaknya mampu memengaruhi persepsi investor asing dalam mempertimbangkan segala upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor privat tampak pada Grafik 1. Dari grafik, persepsi atas kualitas dukungan pemerintah atas sektor swasta melalui regulasi nampak meningkat. Angka tersebut memberikan bukti empiris bahwa dukungan pemerintah atas penerapan IFRS ditanggapi positif oleh investor asing sepanjang tahun 1981-2018. Grafik menunjukkan kenaikan persepsi dunia bisnis atas upaya pemerintah mulai tahun 2003. Persepsi dunia usaha atas pemerintah Indonesia masih di atas Vietnam, namun masih jauh lebih rendah daripada Thailand.



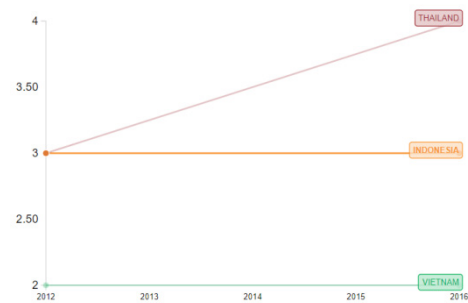
Grafik 1: Kualitas Regulator



Grafik 2: Perlindungan Investor Minoritas: Luas Pengungkapan [Index]

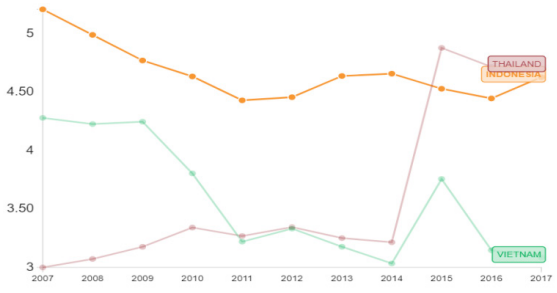
IFRS diharapkan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan para emiten yang terdaftar di Bursa. Pelaporan dapat dikatakan transparan apabila mampu menampilkan berbagai informasi ekonomis dalam laporan keuangan (Barth & Schipper, 2008). Bagan 3 menampilkan transparansi atas pelaporan keuangan pada perusahaan yang listing di bursa dengan memberikan informasi lebih banyak kepada pemegang saham minoritas. Walau bagan 3 menunjukkan derajat transparansi Indonesia

lebih baik daripada Vietnam. Namun, penggunaan IFRS terlihat tidak mampu meningkatkan derajat transparansi pelaporan keuangan. Bahkan, derajat transparansi Thailand cenderung naik, walaupun tidak mewajibkan penerapan IFRS. Pengadopsian tersebut bukan merupakan jaminan akan perbaikan tingkat relevansi laporan keuangan, malah mungkin memperburuk relevansi kandungan informasi, seperti pengalaman di Spanyol (Callao dkk., 2007).



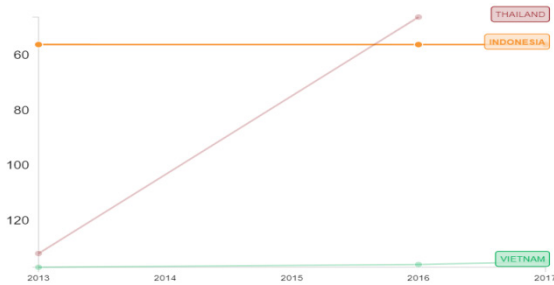
Grafik 3: Transparansi Informasi pada Perusahaan yang Terdaftar Bursa

IFRS mengupayakan untuk memperbaiki akuntansi keuangan berbagai negara dengan melakukan harmonisasi standar. Melalui pengukuran dan pengungkapan kos yang diatur dalam IFRS diyakini akan meningkatkan akuntabilitas keuangan (Barth, 2015). Bagan 4 mengilustrasikan derajat akuntabilitas keuangan sebelum dan setelah penerapan IFRS. Pada awal tahun 2007, derajat akuntabilitas Indonesia mengalami penurunan tajam. Sejak tahun 2012, derajat akuntabilitas mulai mengalami kenaikan perlahan. Dari bagan, derajat akuntabilitas Indonesia cenderung lebih tinggi daripada Thailand dan Vietnam. Bila dikaitkan dengan penerapan IFRS yang mulai diadopsi penuh sejak 2012, maka kenaikan derajat akuntabilitas mungkin terjadi karena pengadopsian standar tersebut.



Grafik 4: Indeks Akuntabilitas

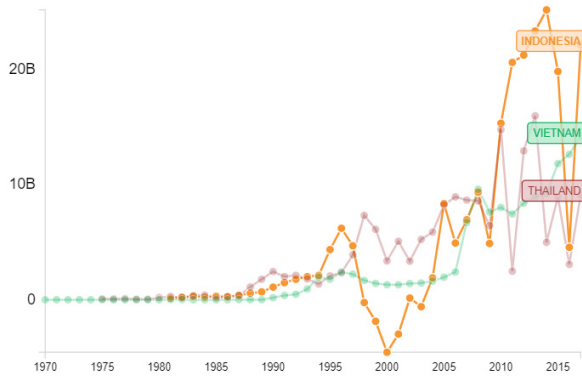
IFRS mempunyai kemampuan untuk menurunkan berbagai macam ketidakpastian di antaranya *country risk* (Bradbury, 2010). Kepatuhan atas penerapan standar internasional merupakan salah satu nilai yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko negara (Ramady, 2013, p. 33). *Country risk* berpeluang memengaruhi minat para investor untuk berinvestasi pada suatu negara tujuan. Bagan 5 menunjukkan bagaimana kecenderungan *country risk* di Indonesia, Thailand dan Vietnam. *Country risk* Indonesia tidak bergeser walaupun telah diterapkannya IFRS. Grafik 3 menunjukkan kemampuan Vietnam dalam mempertahankan peringkat *country risk* yang rendah, walau negara tersebut tidak mewajibkan penerapan IFRS bagi para emiten di bursa saham mereka.



Grafik 5: Country Credit Rating, Value

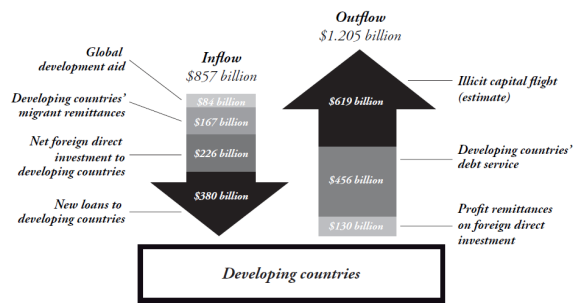
Internasionalisasi standar pelaporan keuangan ternyata tidak mendapatkan ruang untuk menurunkan *country risk* di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya harmonisasi standar internasional tidak cukup kuat memengaruhi pandangan calon investor dunia atas lingkungan bisnis di Indonesia. Jadi, kemungkinan ada motif lain dibalik adanya pengadopsian standar internasional. Salah satu alasan pengadopsian adalah keinginan untuk mendapatkan dana dari Bank Dunia (Gordon, 2012). Untuk itu, tidak ada pilihan yang mungkin bisa dipilih oleh pemerintah selain mengikuti kehendak si empunya uang yaitu para investor dan berbagai lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF), dengan harapan akan mengalimya dana mereka ke negara tertekan. Terlebih, keikutsertaan pada berbagai perjanjian perdagangan seperti GATT/WTO semakin menekan untuk melakukan berbagai hal agar menarik FDI guna menaikkan pertumbuhan ekonomi ekonomi (Büthe dan Milner, 2008). Di Indonesia, penerimaan regulator terhadap IFRS adalah sebuah bentuk kompromi

(Efferin & Rudiawarni, 2014). Negosiasi penggunaan standar internasional dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan regulator dan terlaksananya agenda penerapan IFRS.



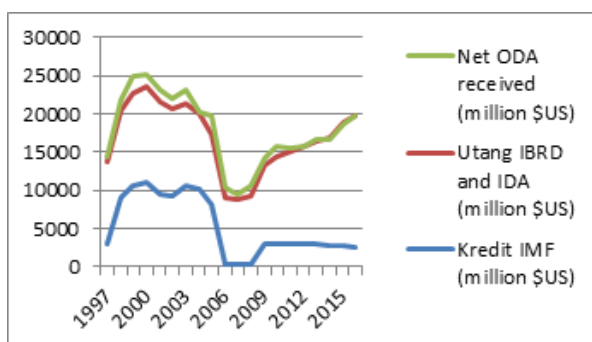
Grafik 6: Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$)

Pada awal perkembangannya, IFRS memang diskenarioikan untuk meningkatkan aliran dana luar untuk masuk di Indonesia. Grafik 6 menampakkan perkembangan FDI tari tahun ke tahun. FDI dari tahun awal data terlihat semakin lama semakin naik. Puncak kenaikan pertama terjadi di tahun 1996. Selanjutnya, dana asing yang masuk ke Indonesia lebih kecil daripada dana yang masuk sejak tahun 1998 sampai dengan 2001. Kondisi tersebut terjadi saat terjadi krisis moneter berkepanjangan di Indonesia, sehingga menurunkan minat para investor asing berinvestasi di Indonesia. Tahun 2002 merupakan tahun awal peningkatan FDI bersih di Indonesia. Aliran FDI bersih semakin kencang di Indonesia sepanjang 2006-2017. Kemampuan Indonesia dalam menarik FDI lebih unggul dibandingkan Thailand dan Vietnam yang tidak mewajibkan penerapan IFRS. Namun, peningkatan FDI di Indonesia juga membawa konsekuensi yang tidak dibayar murah oleh penerimanya.



Bagan 2. Ilicit Capital Flight

Angan-angan yang ditawarkan dengan pengadopsian IFRS hanya tinggal bilamana pengadopsian IFRS tidak menunjukkan peningkatan dana investasi ke dalam negeri bagi negara berkembang, sebaliknya malah menurunkan aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI), serta nilai ekspor dan impor (Lasmin, 2011). Bagan 2 menunjukkan bagaimana negara sedang berkembang menerima konsekuensi penerimaan aliran dana asing. Bagan tersebut menunjukkan komposisi aliran masuk dan keluar yang diterima dan dikeluarkan negara-negara berkembang. Dari bagan, negara-negara berkembang harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk membayar layanan utang daripada yang diterima dari para penanam modal asing.

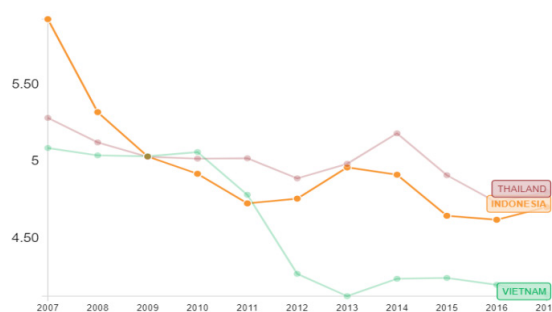


Grafik 7: Utang dan Bantuan dari Lembaga Asing

Kepatuhan Indonesia atas penerapan IFRS tidak terlepas dari campur tangan Bank Dunia, seperti halnya yang dialami oleh negara-negara Afrika (Fröberg dan Waris, 2011). Kepatuhan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan arisan berbunga dari pihak donor kepada kita. Arisan berbunga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Di beberapa negara, keberadaan pendanaan langsung (*Foreign Direct Investment/ FDI*) memang menjadi pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, ada hal yang harus diingat yaitu FDI tidak bisa secara otomatis bisa meningkatkan kinerja ekonomi negara penerima dana segar tersebut (Li dan Liu, 2005). Kenaikan utang memberikan beban berat bagi negara kita ini. Grafik 7 menunjukkan peningkatan utang IBRD dan IDA, serta ODA yang cukup signifikan sejak tahun 2009. ODA sebenarnya ditujukan untuk mengentaskan negara berstatus LDSCs (Biswas, 2018). Peningkatan ODA menandakan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi pada bantuan lembaga internasional. Sementara,

utang yang didanai oleh IMF cenderung mengalami penurunan. Peningkatan FDI meningkatkan kebutuhan dana untuk membayar bunga bagi pemilik modal. Bilamana apa yang kita dapatkan lebih kecil daripada yang diterima, maka negara penerima sebenarnya membayar *illicit capital flight* lebih banyak (Fröberg dan Waris, 2011). Penerapan IFRS dilakukan melalui berbagai fase pertumbuhan untuk menjadi penerapan penuh. Kualitas penerapan IFRS di Indonesia diharapkan akan meningkat setiap tahun dengan peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan. Peningkatan akuntabilitas ternyata ditanggapi positif oleh pemberi bantuan ataupun pinjaman dari lembaga asing.

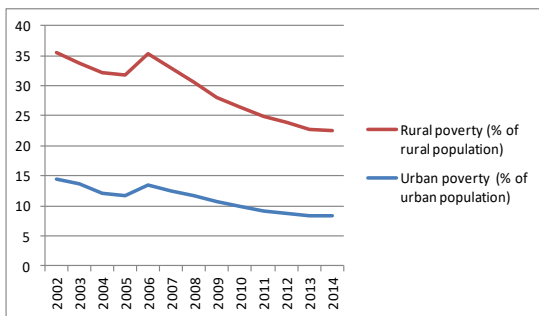
Ada beberapa argument yang menjadikan FDI dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan negara dengan cara memosisikan diri sebagai dana talangan untuk perluasan ekonomi (Mencinger, 2003). Disamping itu, FDI berpotensi meningkatkan transfer teknologi negara maju kepada negara penerima (Alfaro & Johnson, 2012). Transfer teknologi dan inovasi local menjadikan China dan India berhasil mengembangkan teknologi hijau (Lema & Lema, 2012). Di Indonesia, Suyanto and Salim (2013) menemukan tidak adanya kemanfaatan teknologi pada industry farmasi. Perusahaan farmasi asing tetap lebih efisien dibandingkan lokal, sehingga berkemampuan merusak pangsa pasar kita. Grafik 8 menunjukkan hubungan antara FDI dan transfer teknologi di Indonesia, Thailand dan Vietnam. Pada awal perkembangan, kesediaan investor asing untuk transfer teknologi lebih besar daripada kedua negara. Namun pada perkembangannya, kesediaan transfer teknologi semakin menurun. Bagan ini menunjukkan bahwa FDI tidak otomatis menyediakan transfer teknologi pada negara tujuan.



Grafik 8: FDI dan Transfer Teknologi

Aliran dana dari FDI juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di negara tujuan.

Kehadiran FDI diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia termasuk buruh (Nguyen, 2017). Namun, kemampuan FDI dalam menurunkan tingkat pengangguran tidak sama antar negara. FDI tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran di Turki (Aktar & Ozturk, 2009). Sedangkan, FDI mengurangi angka pengangguran secara signifikan di Malaysia (Irfan dkk., 2016) serta Vietnam (Nguyen, 2017). Berdasarkan Grafik 9, pengangguran di Indonesia mencapai puncak kenaikan pada tahun 2005, selanjutnya tingkat pengangguran menurun.



Grafik 9: Pengangguran di Desa dan Kota

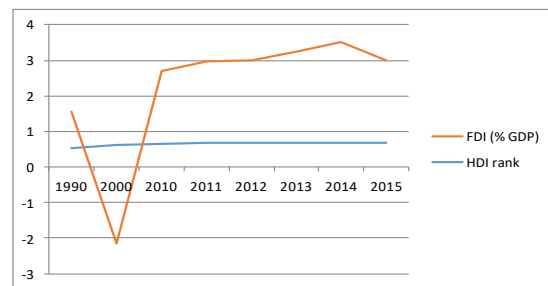
Pengangguran memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Apakah sekiranya FDI mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan tabel 2, FDI tidak cukup kuat menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Bahkan, bila dilihat arah koefisiennya. Kenaikan FDI cenderung akan menaikkan angka pengangguran walaupun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa FDI tidak dimanfaatkan untuk industri yang padat tenaga kerja, sehingga tidak memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.584689	0.362158	15.42057	0
FDINET	7.60E-11	4.49E-11	1.694416	0.1026

Tabel 2: Hubungan antara FDI dan Pengangguran

Kemakmuran suatu negara juga didasarkan pada kualitas manusia yang diukur oleh indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index*. Bagi negara berkembang, kehadiran FDI diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak peningkatan HDI (Colen, Maertens, & Swinnen, 2009) dengan menyediakan dana untuk pengembangan industri.

Grafik 10 menunjukkan tidak meningkatnya HDI di Indonesia dalam tahun observasi. Nilai FDI cenderung naik dari tahun ke tahun. Namun, peringkat HDI tidak banyak mengalami perubahan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa negara pendana tidak berminat untuk menurunkan ketergantungan Indonesia. Di negara berkembang, FDI akan berhasil bilamana negara tidak membiarkan investor asing memasuki semua sektor industri untuk melindungi kepentingan domestik serta tingkat korupsi yang rendah (Reiter & Steensma, 2010).

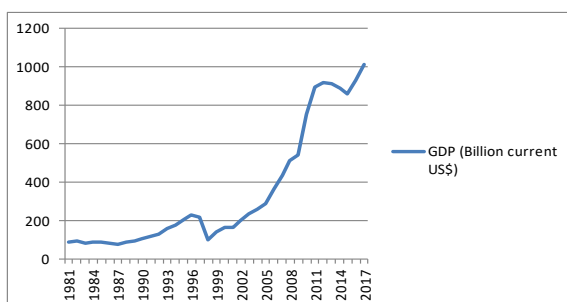


Grafik 10: FDI dan HDI

FDI sebenarnya hanya merupakan pendorong. Sebagai pendorong, IFRS memerlukan kondisi kondusif agar berjalan optimal, yaitu adanya *human capital* yang kuat pada suatu negara penerima dana tersebut serta kesenjangan teknologi yang tidak seberapa besar, apabila kondisi tersebut tidak tersedia, maka kemungkinan yang terjadi malah sebaliknya (Borenszteina dkk., 1998; Li dan Liu, 2005). Selanjutnya, bagi negara-negara sedang berkembang, FDI hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima dengan syarat ada ketetapan pemerintah yang membatasi investor asing untuk memasuki sektor-sektor tertentu (Reiter dan Steensma. 2010), bila tidak ada pembatasan, maka kehadiran FDI akan berpotensi menggerus produk-produk lokal (Alfaro dkk., 2010). Lain dengan negara maju, FDI cukup kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan kedua faktor tersebut (Alfaro dkk., 2010).

Lebih lanjut, tingkat korupsi juga tidak bisa dipandang sebelah mata untuk berjalannya FDI. Sebagaimana Reiter dan Steensma (2010) membuktikan bahwa FDI berhubungan positif dengan tingkat korupsi suatu negara. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Tingkat persepsi korupsi suatu negara umumnya dinilai dengan *Corruption Perception Index* (CPI) yang mengukur tingkat persepsi korupsi pada

birokrasi pemerintahan serta politisi suatu negara. Menurut *transparency international org.*, tingkat persepsi korupsi Indonesia mengalami perbaikan walaupun tidak drastis, dari 32 (2012), 32 (2013), menjadi 34 (2014). Skor semakin tinggi menunjukkan semakin bersihnya suatu negara atas tindak korupsi, menurut skala tersebut ada 10 tingkatan dari mulai terkorup (0-0) sampai dengan sangat bersih dari tindak korupsi (90-100). Walaupun masih jauh untuk menuju bersih, namun setidaknya ada perbaikan.



Grafik 11: GDP Indonesia

FDI bisa dikatakan memakmurkan bangsa penerima bilamana mampu meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) negara tujuan. Grafik 11 menunjukkan peningkatan GDP Indonesia dari tahun ke tahun. Bagi negara berkembang, FDI merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi penggerak perekonomian (Sengupta & Puri, 2018). Berdasarkan olah data sepanjang tahun 1981-2017 yang nampak di tabel 3, FDI berpengaruh signifikan negatif terhadap GDP p value sebesar 0,000. Pada negara berkembang, FDI umumnya berkemampuan meningkatkan GDP dalam jangka panjang melalui transfer pengetahuan dan aplikasi teknologi baru (Hansen & Rand, 2006). Namun, bahasan sebelumnya menunjukkan FDI tidak berdampak pada transfer teknologi dan pembangunan manusia. Dengan demikian, peningkatan FDI lebih menjadi beban bagi kemakmuran rakyat Indonesia. FDI bukan merupakan senjata ampuh untuk meningkatkan kemaakmuran masyarakat.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.56E+11	2.56E+10	6.084002	0
FDINET	-49.5833	3.713813	-13.35105	0

Tabel 3: Hubungan FDI dengan GDP

5. KESIMPULAN

Konvergensi standar internasional dirasa menjadi kewajiban yang harus dijalankan, khususnya bagi negara berkembang. Internasionalisasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaporan bagi perusahaan di Indonesia. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan bisa diukur dengan perbaikan pengungkapan serta kenaikan transparansi. Penerapan IFRS telah meningkatkan persepsi dukungan pemerintah atas yang mendukung dunia bisnis. Namun, penerapan IFRS tidak banyak memengaruhi pengungkapan minoritas yang menggunakan pelaporan keuangan untuk kepentingan bisnis mereka. Kualitas pelaporan keuangan dalam bentuk transparansi juga tidak bergeser dari posisinya. Walaupun transparansi dan kualitas pengungkapan tidak bergeser. Pemain asing masih melihat adanya peningkatan akuntabilitas dari tahun ke tahun.

Internasionalisasi standar di Indonesia bukanlah penentu masuknya aliran FDI dan ODA di Indonesia. Stabilitas politik suatu negara merupakan kunci dari investasi asing. Pelaksanaan FDI ternyata juga tidak diringi dengan transfer teknologi dan pengetahuan. Tidak meningkatnya Indeks pembangunan manusia memberikan indikasi tidak adanya minat dari pemilik modal asing untuk membangun sumber daya manusia di negara penerima. Sementara, tingkat pengangguran juga belum berhasil diturunkan dengan bantuan FDI. Penurunan pengangguran juga tidak berubah dengan naiknya aliran FDI. Berdasar data, keberadaan FDI malah menjadi beban bagi kemakmuran masyarakat. Akhirnya, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa FDI yang selama ini menjadi alasan konvergensi standar akuntansi keuangan di Indonesia terbukti malah menjadi beban bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aktar, I., & Ozturk, L. (2009). Can unemployment be cured by economic growth and foreign direct investment in Turkey. *International Research Journal of Finance and Economics*, 27(2009), 204-211.
- Alfaro, L., & Johnson, M. (2012). Foreign direct investment and growth *The evidence and impact of financial globalization* (pp. 299-309): Elsevier.
- Arnold, P. J. (2012). The political economy of

- financial harmonization: The East Asian financial crisis and the rise of international accounting standards. *Accounting, Organizations and Society*, 37(6), 361-381.
- Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. *Accounting and Business Research*, 36(sup1), 5-27.
- Barth, M. E. (2015). Financial accounting research, practice, and financial accountability. *Abacus*, 51(4), 499-510.
- Barth, M. E., & Schipper, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 23(2), 173-190.
- Biswas, R. (2018). The Least Developed Countries: Opportunities and Challenges *Emerging Markets Megatrends* (pp. 167-186): Springer.
- Bradbury, M. E. (2010). Commentary: discount rates in disarray—evidence on flawed goodwill impairment testing. *Australian Accounting Review*, 20(3), 313-316.
- Colen, L., Maertens, M., & Swinnen, J. (2009). Foreign direct investment as an engine for economic growth and human development: a review of the arguments and empirical evidence. *Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse*, 3, 177.
- De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. *Journal of Accounting Research*, 49(4), 895-931.
- Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. *Applied economics*, 38(10), 1091-1110.
- Efferin, S., & Rudiawarni, F. A. (2014). Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 138-164.
- Epstein, B. J., & Jermakowicz, E. K. (2010). *WILEY Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2010*: John Wiley & Sons.
- Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Zhu, W. (2012). The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(4), 374-398.
- Hamidah. (2014). *Kebijakan Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia dalam Perspektif Ekologi Akuntansi*. (Doctoral Degree (unpublish)), Brawijaya University, Malang.
- Hansen, H., & Rand, J. (2006). On the causal links between FDI and growth in developing countries. *World Economy*, 29(1), 21-41.
- Hopper, T., Lassou, P., & Soobaroyen, T. (2017). Globalisation, accounting and developing countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 125-148.
- Ionas, cu, I., Ionas, cu, M., Olimid, L., & Artemisa Calu, D. (2007). An empirical evaluation of the costs of harmonizing Romanian accounting with international regulations (EU Directives and IAS/IFRS). *Accounting in Europe*, 4(2), 169-206.
- Irpan, H. M., Saad, R. M., Nor, A. H. S. M., Noor, A. H. M., & Ibrahim, N. (2016). *Impact of foreign direct investment on the unemployment rate in Malaysia*. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.
- Kim, J.-B., & Shi, H. (2012). IFRS reporting, firm-specific information flows, and institutional environments: International evidence. *Review of Accounting Studies*, 17(3), 474-517.
- Lema, R., & Lema, A. (2012). Technology transfer? The rise of China and India in green technology sectors. *Innovation and Development*, 2(1), 23-44.
- Maradona, A. F., & Chand, P. (2018). The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 57-68.
- Márquez-Ramos, L. (2011). European accounting harmonization: Consequences of IFRS adoption on trade in goods and foreign direct investments. *Emerging markets finance and trade*, 47(sup4), 42-57.
- Mencinger, J. (2003). Does foreign direct investment always enhance economic growth? *Kyklos*, 56(4), 491-508.
- Nguyen, M. (2017). The Influence of FDI on an Economy As Overall in Vietnam (2006 – 2015).
- Nnadi, M., & Soobaroyen, T. (2015). International financial reporting standards and foreign direct investment: The case of

- Africa. *Advances in Accounting*, 31(2), 228-238.
- Nwaogu, U. G., & Ryan, M. J. (2015). FDI, foreign aid, remittance and economic growth in developing countries. *Review of Development Economics*, 19(1), 100-115.
- Ramady, M. A. (2013). *Political, economic and financial country risk*: Springer.
- Reiter, S. L., & Steensma, H. K. (2010). Human development and foreign direct investment in developing countries: the influence of FDI policy and corruption. *World development*, 38(12), 1678-1691.
- Sauvant, K. P., & Mallampally, P. (2015). Policy options for promoting foreign direct investment in the least developed countries. *Transnational Corporations Review*, 7(3), 237-268.
- Sengupta, P., & Puri, R. (2018). Exploration of Relationship between FDI and GDP: A Comparison between India and Its Neighbouring Countries. *Global Business Review*, 0972150918760026.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (Eleventh edition ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Suyanto, & Salim, R. (2013). Foreign direct investment spillovers and technical efficiency in the Indonesian pharmaceutical sector: firm level evidence. *Applied Economics*, 45(3), 383-395.
- Wang, C. (2014). Accounting standards harmonization and financial statement comparability: Evidence from transnational information transfer. *Journal of Accounting Research*, 52(4), 955-992.
- Wiyani, N. T. (2012). Standarisasi, Harmonisasi, dan Konvergensi IFRS. *Makalah Akuntansi*.